

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Auditing

2.1.1 Pengertian Audit

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dan organisasi tersebut. Melihat dari uraian di atas, pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independent ditujukan terhadap pernyataan mengenai kegiatan ekonomi, yang disajikan oleh suatu organisasi dalam laporan keuangannya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor independent untuk menilai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan.

Auditing bukan merupakan cabang akuntansi, tetapi merupakan suatu disiplin bebas yang mendasarkan diri pada hasil kegiatan akuntansi dan data kegiatan yang lain. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pengajian transaksi keuangan perusahaan dan organisasi lain. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dipakai oleh manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan data kegiatan yang lain. Di lain pihak *auditing* ditujukan untuk menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan

oleh manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, *auditing* harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen atau harus independent serta dapat diandalkan dari sudut profesinya.

Pengertian-pengertian audit menurut beberapa para ahli antara lain :

1. Menurut Sukrisno Agoes, 1996:1

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

2. Menurut Amir Abadi Jusuf, 1997:1

“*Auditing* adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan”.

3. Menurut Alvin A. Arens and James K. Leobbecke, 2000:9

“ *Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about quantifiable information of and economic entity to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person*”.

Definisi di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut :

Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atas informasi keuangan dari suatu perusahaan oleh orang yang kompeten dan independent dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Menurut ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) yang dikutip oleh Abdul Halim, 1995:1

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan”.

5. Arens dan Loebbecke, 1996:1

“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan”.

6. Haryono Jusup, 2001:6

“Pergauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengerahkan bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

- 13
7. Ralph Estes dan Nugroho Widjayanto (Kamus Akuntansi Edisi Kedua, 2001)

“Audit adalah suatu tinjauan ulang untuk menetapkan kecermatan dan kesalahan catatan dan laporan atas kesesuaian atas laporan tersebut dengan kebijakan yang ditetapkan, khususnya pengujian yang dilaksanakan sesuai dengan *generally accepted auditing standar*, atas laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan oleh seorang akuntan publik terdaftar yang independen untuk menetapkan apakah dalam opini akuntan publik itu laporan tersebut menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil operasi dan perubahan posisi keuangan perusahaan”.

8. Riduan Tobink dan Nirwana Talankky (Kamus Istilah Akuntansi Edisi Lengkap, 2001)

“Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan atau pemeriksaan lainnya yang sistematis mengenai kebenaran dan kewajaran, serta keabsahan bukti formil maupun bukti materil atas suatu transaksi atau mengenai kegiatan suatu perusahaan sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang ditetapkan.”

9. Menurut Mulyadi, 2002 : 9

“Audit adalah salah satu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada para pemakai yang berkepentingan.”

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bahan bukti yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten terhadap laporan keuangan dan catatan-catatan

pembukuan serta bukti pendukung untuk memberikan pendapat atau opini atas laporan keuangan tersebut.

2.1.2 Tujuan Audit

Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independent adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Uraian diatas secara tepat menekankan pemberian pendapat atas laporan keuangan. Auditor mengumpulkan bahan bukti untuk menarik kesimpulan mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan mengeluarkan laporan keuangan yang tepat. Menurut beberapa para ahli tujuan audit adalah :

1. Sofyan Syafri Harahap, 1994:168
 - a. Untuk mengetahui eksistensi, apakah pos tersebut benar-benar ada dalam perusahaan.
 - b. Untuk mengetahui kelengkapan, apakah buku atau laporan telah menggambarkan keseluruhan perkiraan itu secara lengkap.
 - c. Untuk mengetahui hak dan kewajiban, apakah perusahaan mempunyai hak kepada pos atau perkiraan itu atau sebaliknya perkiraan itu merupakan kewajibannya.
 - d. Untuk mengetahui ketelitian, apakah penjumlahan, perkalian, dan pembagian sudah dilakukan dengan teliti dan benar.

- e. Untuk mengetahui penilaian, apakah cara penilaian yang diterapkan dalam pencatatannya benar sesuai dengan pedoman yang diatur dalam PAI.
 - f. Untuk mengetahui penyajian, apakah penyajian pos tersebut dalam laporan keuangan sudah tetap dan sesuai dengan PAI.
2. Menurut Josep W. Wilkinson, 1995:364 audit (pemeriksaan) dilaksanakan dengan tujuan yaitu :
- a. Mengevaluasi keandalan informasi dan
 - b. Mengevaluasi efisiensi serta keefektifan sistem informasi.
3. Arens dan Lobbecke, 1996:114

Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.1.3 Jenis-jenis Audit

Jenis-jenis audit menurut beberapa para ahli antara lain :

1. Menurut Sukrisno Agoes, 1996:5

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dibedakan atas beberapa bagian, yaitu:

- a. *General Audit* (Pemeriksaan Umum)

Adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang independen dengan tujuan untuk bisa

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Special Audit (Pemeriksaan Khusus)

Adalah suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas beberapa bagian, yaitu:

a. Management Audit (Operational Audit)

Adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

b. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan)

Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan

(manajemen, dewan komisaris) maupun pihak extern (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).

c. *Internal Audit* (Pemeriksaan Intern)

Adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

d. *Computer Audit*

Adalah pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing*) sistem.

2. Menurut Arens dan Loebbecke, 1996:4

Menurut Arens and Loebbecke ada 3 jenis, yaitu :

a. Audit laporan keuangan

Adalah audit yang menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi dan telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

b. Audit Operasional

Merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi dari suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya.

c. Audit Ketaatan

Adalah audit yang mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

3. Menurut Joseph W. Wilkinson, 1995 : 365, audit yang dapat dilakukan pada suatu perusahaan yang tipikal diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Audit manajemen atas struktur, rencana kebijakan, sikap karyawan dalam organisasi dan lain-lain.
- b. Audit operasional atas efisiensi dan efektivitas penggunaan seluruh sumber daya serta sejauh mana praktek dan prosedur yang telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
- c. Audit ketaatan atas sejauh mana ketaatan pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan kewajiban-kewajiban lain kepada badan ekstem.
- d. Audit pengembangan sistem atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan berbagai tahap dalam proyek pengembangan sistem.
- e. Audit pengendalian internal atas kecukupan pengendalian internal dan tindak pengamanan.

- e. Audit keuangan atas kewajaran penyajian posisi keuangan dari hasil operasi perusahaan dalam laporan keuangan.

4. Menurut Haryono Jusup, 2001:15

a. Audit Laporan Keuangan,

Adalah menentukan apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan tentang informasi kuantitatif yang diperiksa.

b. Audit Operasional

Adalah pengkajian atau review atas setiap bagian atau prosedur dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Hasil akhir dari suatu audit operasional biasanya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi.

c. Audit Ketaatan

Adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

5. Menurut Amir Abadi Jusuf, 1997:4

a. Audit Laporan Keuangan

Bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

b Audit Operasional

Merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya pada saat selesainya audit operasional auditor akan memberikan saran kepada pihak manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

c Audit Ketaatan

Bertujuan mempertimbang apakah auditi telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otorisasi lebih tinggi.

2.1.4 Jenis-jenis Auditor

Ada 4 jenis pelaksana audit yang paling umum dikenal antara lain :

a Auditor Independen

Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai suatu auditor independen bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya. Produk yang dihasilkan oleh auditor independen berupa opini.

b Auditor Pemerintah

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA), kemudian terdapat Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) pada departemen-departemen pemerintah.

c Auditor Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada di bawah Departemen Keuangan RI, bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksana DJP di lapangan adalah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Tanggung jawab Karikpa adalah melakukan audit kepada para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan.

d Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Mereka biasanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direksi, Direktur Eksekutif atau Kepala Komite Audit dari Dewan Komisaris

2.1.5 Standar Audit

Standar atau norma auditing merupakan pedoman bagi auditor untuk menjalankan tanggung jawab profesinya. Norma ini meliputi pertimbangan mengenai kualitas profesional mereka seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti audit. Standar audit

yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, sikap mental dan independensi harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa semacam itu tidak dapat dinyatakan.

2.1.6 Peran Profesi Akuntan Publik dalam Perekonomian

Agar mesin perekonomian suatu negara dapat menyalurkan dana masyarakat ke dalam usaha-usaha produktif yang beroperasi secara efisien, maka dalam perekonomian perlu disediakan informasi keuangan yang andal, yang memungkinkan para investor memutuskan ke usaha-usaha yang apa dana mereka diinvestasikan. Dana yang berada ditangan masyarakat akan ditarik oleh perusahaan yang mampu menghasilkan *return* terbesar atas investasi dan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat. Jika manajemen suatu perusahaan dengan sengaja mengelabui masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang seolah-olah menggambarkan hasil usaha yang tinggi dan posisi keuangan yang seolah-olah sehat, maka dana para investor akan mengalir secara salah kepada perusahaan tersebut. Akibatnya, dana masyarakat mengalir ke perusahaan

yang beroperasi tidak efisien, yang pada akhirnya berdampak kepada kerugian ekonomi secara keseluruhan.

Informasi keuangan tersebut disajikan oleh manajemen kepada masyarakat keuangan untuk memungkinkan masyarakat menilai pertanggungjawaban keuangan manajemen dan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kembali investasi (*return of investment*) dan posisi keuangan perusahaan. Namun bagi masyarakat keuangan, laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen mengandung kemungkinan adalah pengaruh kepentingan pribadi manajemen dalam menyajikan informasi hasil usaha dan posisi keuangan yang menguntungkan bagi mereka dan keteledoran serta ketidakjujuran yang dilakukan oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu masyarakat keuangan memerlukan jasa profesional untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada masyarakat. Atas dasar informasi keuangan yang andal, masyarakat keuangan akan memiliki dasar yang andal untuk menyalurkan dana mereka ke usaha-usaha yang beroperasi secara efisien dan memiliki posisi keuangan yang sehat. Penyediaan informasi keuangan yang memungkinkan masyarakat menyalurkan dana mereka ke usaha-usaha yang efisien akan menjadikan sehat perekonomian suatu negara. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan

memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.

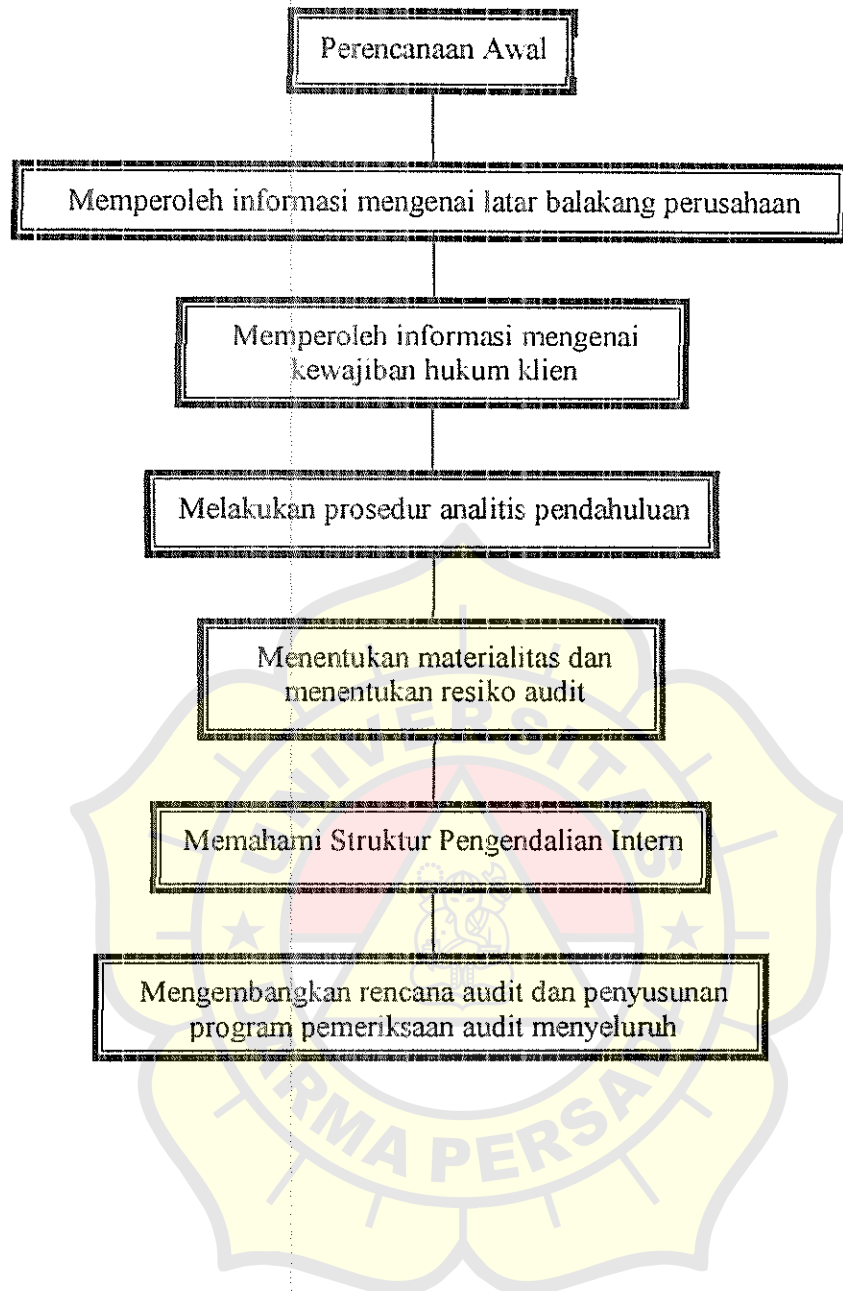
2.2. Perencanaan Audit

Standar pekerja lapangan pertama mensyaratkan adanya perencanaan yang memadai. "Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya".

Ada tiga alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasannya dengan baik :

1. Untuk memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup.
2. Untuk membatu menekan biaya audit.
3. Untuk menghindari salah pengertian dengan klien.

Mendapatkan bahan bukti kompeten yang cukup merupakan hal yang penting jika kantor akuntan publik ingin menekan tanggung jawab hukum seminimal mungkin dan mempertahankan reputasi yang baik dalam masyarakat profesi. Dengan menekan biaya dalam batas yang wajar, Kantor Akuntan Publik (KAP) akan dapat bersaing sehingga para kliennya tidak lari darinya, dengan catatan bahwa KAP tersebut memang mempunyai reputasi dalam menjalankan pekerjaan yang berkualitas. Menghindari salah pengertian dengan klien adalah penting untuk menjaga hubungan baik dengan klien dan untuk memudahkan pelaksanaan kerja yang baik. Gambar 2.1 menunjukkan tujuan bagian utama perencanaan audit.



2.2.1. Perencanaan Awal

Sebagian besar perencanaan awal dibuat pada awal penugasan. Perencanaan awal menyangkut keputusan apakah akan menerima atau melanjutkan pelaksanaan audit bagi klien, mengevaluasi alasan-alasan

klien untuk diaudit, memilih staf untuk penugasan tersebut, dan mendapatkan surat penugasan.

2.2.2. Memperoleh Informasi Mengenai Latar Belakang Perusahaan

Untuk dapat melakukan audit yang memadai, diperlukan pengetahuan yang luas mengenai bidang usaha dan industri klien serta pengetahuan atas operasi perusahaan. Sebagian besar informasi diperoleh di tempat klien, terutama untuk klien yang baru. Informasi mengenai latar belakang didapatkan dengan berbagai cara diantaranya :

a. Memahami bidang usaha klien

Ada tiga alasan mengapa diperlukan pemahaman yang baik atas industri klien. Pertama, banyak industri mempunyai aturan akuntansi yang khas yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Misalnya untuk perusahaan kereta api, organisasi nirlaba, lembaga keuangan dan banyak organisasi yang lain. Kedua, auditor sering dapat mengidentifikasi resiko dalam industri yang akan mempengaruhi penetapan resiko audit yang dapat diterima. Contoh industri yang beresiko tinggi antara lain, seperti industri simpan pinjam dan asuransi jiwa. Ketiga, pemahaman resiko tersebut menolong auditor dalam mengidentifikasi resiko bawaan dari klien. Contoh resiko bawaan klien adalah, resiko bawaan kolektibilitas piutang usaha, resiko bawaan cadangan kerugian dalam industri asuransi kebakaran.

b. Meninjau pabrik dan kantor

Bermanfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bidang usaha dan operasi klien karena akan diperoleh kesempatan untuk menemui pegawai kunci dan mengamati operasi perusahaan. Peninjauan langsung atas fasilitas fisik akan membantu auditor dalam memahami pengamatan fisik aktiva dan juga memudahkan auditor untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang timbul kemudian dalam pelaksanaan audit.

c. Menelaah kebijakan perusahaan

Sebagian besar kebijakan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan merupakan bagian dari struktur pengendalian intern. Termasuk di dalamnya adalah wewenang untuk pelepasan sebagian dari usaha, kebijakan kredit, penjaminan ke perusahaan afiliasi, dan kebijakan akuntansi untuk mencatat aktiva dan pengakuan pendapatan.

d. Mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Karena transaksi yang mempunyai hubungan istimewa harus diungkapkan, penting artinya bahwa seluruh pihak yang mempunyai hubungan istimewa diidentifikasi dan dimasukkan dalam arsip permanent pada awal penugasan. Jadi dapat ditingkatkan upaya menemukan transaksi hubungan istimewa antar perusahaan yang tidak diungkapkan. Cara umum untuk menelaah pihak yang

mempunyai hubungan istimewa adalah dengan cara bertanya kepada manajemen, memeriksa daftar pemegang saham.

e. Mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar

Jika auditor menghadapi situasi yang memerlukan pengetahuan khusus, perlu menghubungi seorang spesialis. Auditor harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai industri klien untuk menentukan apakah diperlukan seorang spesialis. Perencanaan yang baik diperlukan untuk meyakinkan bahwa seorang ahli siap jika diperlukan dan bahwa ahli itu benar-benar kompeten dan jika mungkin independent terhadap klien.

2.2.3. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien

Tiga dokumen hukum dan catatan yang berkaitan erat yang harus diperiksa pada awal penugasan yaitu : akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan, risalah rapat dewan direksi, komisaris dan pemegang saham, dan kontrak.

a. Akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan

Akte pendirian perusahaan diterbitkan oleh Negara dimana perusahaan didirikan dan merupakan dokumen hukum yang penting untuk mengakui suatu perusahaan sebagai satuan usaha yang berdiri sendiri.

Anggaran dasar mencakup peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh para pemegang saham perseroan.

b. Risalah rapat dewan direksi

Adalah catatan resmi rapat dewan direksi dan pemegang saham.

Mengenai informasi-informasi berikut :

1. Pengumuman deviden
2. Otorisasi penggajian untuk pejabat
3. Persetujuan kontrak dan kesepakatan
4. Otorisasi atas perolehan aktiva
5. Persetujuan merger
6. Otorisasi pinjaman jangka panjang
7. Persetujuan untuk menggadaikan efek-efek otorisasi pegawai yang berhak menandatangani cek.
8. pelaporan mengenai kemajuan operasi perusahaan

c. Kontrak

Klien terlibat dalam berbagai kontrak yang perlu diketahui oleh auditor, termasuk wesel jangka panjang, opsi saham, rencana pensiun, sewa guna usaha dll.

2.2.4. Pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan

Melakukan prosedur analitis selama tahap perencanaan adalah bagian penting dari pelaksanaan audit yang efisien dan efektif. Untuk menekankan arti penting prosedur analitis selama tahap perencanaan, berikut contoh prosedur analitis yang biasanya dilakukan selama audit untuk empat tujuan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2-1

Tabel 2-1

Prosedur Analitis Yang Dilakukan Selama	
Tujuan	Tahap Perencanaan
Memahami industri dan bidang usaha klien	Hitung rasio-rasio kunci dan bandingkan dengan rata-tara industri lain
Menilai kelangsungan hidup perusahaan	Hitung rasio hutang terhadap ekuitas dan bandingkan dengan tahun lalu dan perusahaan sejenis yang sukses dalam industri
Menunjukkan kemungkinan salah saji	Bandingkan beban perbaikan dan pemeliharaan dengan tahun lalu lihat fluktuasi yang besar
Mengurangi pengujian terinci	Bandingkan biaya yang dibayar dimuka dan akun beban terkait dengan tahun lalu

2.2.5. Menentukan materialitas dan menetapkan resiko audit

a. Materialitas

Suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional. Materialitas adalah faktor penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu.

Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah suatu laporan keuangan salah saji dalam jumlah yang material. Apabila auditor

berpendapat ada salah saji yang material maka ia harus memberi tahu kepada klien sehingga koreksi dapat dilakukan. Jika klien menolak untuk mengoreksi laporan tersebut, pendapat dengan pengecualian atau pernyataan tidak wajar harus diberikan. Karena itu auditor harus memahami benar penerapan materialitas. Tujuan penerapan materialitas ini adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan awal jumlah materialitas :

1. Materialitas sebagai konsep yang relatif dan bukan absolut salah saji dalam jumlah (salah saji dalam jumlah tertentu dapat dianggap material pada sebuah perusahaan kecil tapi tidak material pada perusahaan besar).
2. Beberapa dasar yang dibutuhkan untuk menetapkan materialitas (karena sifatnya relatif maka diperlukan basis untuk menentukan tingkat materialitas suatu salah saji).
3. Faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas.
 - a. Jumlah yang diakibatkan ketidakberesan biasanya dipandang lebih penting dari pada kekeliruan yang tidak disengaja.
 - b. Kekeliruan yang kecil dapat dipandang kalau berkaitan dengan kewajiban kontrak.
 - c. Kekeliruan yang tidak material dapat menjadi material kalau mempengaruhi kecenderungan laba.

AICPA sampai saat ini belum bersedia menerbitkan suatu pedoman yang spesifik mengenai materialitas untuk para praktisi, karena dikhawatirkan pedoman semacam ini akan dipakai tanpa mempertimbangkan kompleksitas dari hal-hal yang mempengaruhi keputusan auditor.

Laporan keuangan mengandung salah saji yang material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Salah saji dapat menjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan.

b. Resiko

Resiko dalam audit berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Auditor menyadari misalnya, bahwa ada ketidakpastian mengenai kompetensi bahan bukti, efektivitas struktur pengendalian klien, dan ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Auditor harus mempertimbangkan resiko audit dan materialitas baik dalam :

- a Merencanakan audit dan merancang prosedur audit.

- b Mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Resiko audit adalah resiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

Resiko audit terdiri dari :

- 1 Resiko Bawaan

Resiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Uang tunai lebih mudah dicuri dari pada persediaan batu bara.

- 2 Resiko Pengendalian

Resiko pengendalian adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Resiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa resiko

pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern.

3 Resiko Deteksi

Resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena kepastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut sudah diperiksa 100%. Ketidakpastian lain semacam ini timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu.

2.2.6. Memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan resiko pengendalian.

Auditor diwajibkan oleh standar pekerjaan lapangan kedua untuk memahami pengendalian intern yang berlaku.

SA Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan paragraf 06 mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Dari definisi pengendalian intern di atas terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain.
3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam suatu sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Oleh karena itu sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, auditor harus memahami terlebih dahulu mengenai pengendalian intern.

Setiap pengendalian intern memiliki keterbatasan bawaan, yaitu :

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu dan tekanan lainnya.
2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan.
3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas.
4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang

tidak sah seperti keuntungan pribadi manajemen, penyajian kondisi kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang tinggi dari jumlah yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus yang lebih tinggi bagi dirinya.

5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan.

Banyak pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian intern yaitu manajemen, dewan komisaris dan komite audit, auditor intern, personel lain entitas, auditor independen, dan pihak luar lain.

Ada lima unsur pengendalian intern yang terdiri dari :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penafsiran risiko informasi dan komunikasi
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Lingkungan pengendalian terdiri dari enam unsur, yaitu nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, berfungsinya dewan

komisaris dan komite audit, falsafah dan gaya operasi, struktur organisasi, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Penafsiran resiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dan desain aktivitas pengendalian untuk mengurangi resiko tersebut. Informasi mencakup sistem akuntansi yang merupakan alat untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel entitas yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang umumnya digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu pengendalian pengolahan informasi, pemisahan fungsi yang memadai, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan, review atas kinerja. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Tujuan auditor mengumpulkan informasi pengendalian intern adalah untuk menentukan apakah audit mungkin dilaksanakan, salah saji material yang secara potensial dapat terjadi, resiko deteksi, dan perancangan pengujian.

Ada tiga cara yang biasanya dipakai oleh auditor untuk mendokumentasikan hasil pemahaman atas pengendalian intern kliennya, yaitu kuesioner pengendalian intern baku, uraian tertulis, dan bagan alir sistem.

Sumber informasi untuk memahami pengendalian intern yang berlaku adalah bagan organisasi dan deskripsi jabatan; buku pedoman akun; buku pedoman sistem akuntansi; wawancara dengan karyawan inti; wawancara dengan karyawan pelaksana, laporan, kertas kerja, dan program audit auditor intern (*internal auditor*); pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan mekanik, dan media lain yang digunakan untuk mencatat transaksi, mengolah data keuangan dan data operasi; kunjungan ke seluruh kantor dan pabrik; dan laporan mengenai rekomendasi perbaikan pengendalian intern dan laporan audit tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh auditor.

Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian intern, auditor melakukan dua macam pengujian, yaitu pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern dan pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern. Untuk menentukan apakah pengendalian intern yang digambarkan dalam bagan alir sistem akuntansi dan jawaban kuesioner pengendalian intern benar-benar ada dan dilaksanakan, auditor menempuh dua cara sebagai berikut.

- a. Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu.
- b. Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat.

Audit intern memberikan bantuan besar bagi auditor dalam audit atas laporan keuangan. Auditor independen perlu mempertimbangkan pekerjaan auditor intern dan menggunakan pekerjaan auditor intern untuk membantu pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien.

Alasan klien menyusun sistem pengendalian intern adalah dalam rangka membantu mencapai tujuan perusahaan. Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern suatu satuan usaha.

Manajemen mempunyai lima kepentingan dalam merancang struktur pengendalian intern yang efektif, diantaranya :

- a Keandalan laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi

telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan, misalnya prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b Mendorong efisiensi dan efektivitas operasional.

Pengendalian dalam suatu organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif.

Bagian penting lain dari efektivitas dan efisiensi adalah pengamatan aktiva dan catatan aktiva fisik perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak kalau tidak dilindungi oleh pengendalian yang memadai. Kondisi yang sama untuk aktiva non fisik seperti piutang usaha, dokumen penting, dan catatan-catatan lainnya.

c Ketaatan kepada hukum dan peraturan.

Banyak sekali hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Beberapa diantaranya berkaitan langsung dengan akuntansi. Misalnya UU Lingkungan Hidup dan UU Perburuhan. Peraturan yang lain sangat berkaitan dengan akuntansi seperti UU Perpajakan, dan UU Perseroan Terbatas.

Dilihat dari sudut pandang kepentingan auditor pengendalian intern dirancang untuk :

d Keandalan pelaporan keuangan

Study atas struktur pengendalian intern klien dan penetapan resiko pengendalian adalah penting bagi auditor dan secara khusus dimasukkan dalam standar auditing yang berlaku umum. Standar pekerja lapangan menyebutkan :

“ Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.”

Untuk memenuhi standar pekerja lapangan kedua, auditor berkepentingan terutama terhadap pengendalian intern yang berkaitan dengan kepentingan manajemen yang pertama adalah keandalan laporan keuangan. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan manajemen dan pegawai dan sampai tingkat tertentu, unsur-unsur pelanggaran hukum. Dengan demikian auditor menaruh perhatian pada pengendalian berkenaan dengan pengamanan aktiva dan ketaatan kepada hukum.

e Penekanan pada pengendalian atas golongan transaksi

Hal yang harus ditekankan oleh auditor adalah pengendalian atas golongan transaksi bukan saldo akun. Alasannya adalah bahwa keakuratan dari hasil sistem akuntansi sangat tergantung pada keakuratan masukan dan pemrosesan.

Auditor dapat membuat memorandum yang menetapkan rencana audit awal, terutama untuk entitas yang besar dan kompleks. Dalam perencanaan auditnya auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit

2.3. Program Audit

Latar belakang yang diperoleh selama survey pendahuluan akan membantu mengarahkan cakupan audit yang direncanakan. Setiap operasi yang luas dengan banyak keterkaitan dan proses dapat menghabiskan banyak waktu audit jika auditor memutuskan untuk memeriksa setiap aktivitas yang dilakukan. Untuk menaati norma pemeriksaan akuntan, untuk memahami prosedur-prosedur klien, dan untuk melaporkan serta memberikan pendapat yang tepat, para auditor harus melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan, dan meneliti keaslian bukti-bukti. Guna memperlancar kegiatan tersebut auditor harus menyusun program pemeriksaan audit. Program audit merupakan suatu daftar dan uraian tertulis yang sistematis yang menjelaskan rencana serta rancangan audit yang merupakan perwujudan dari langkah-langkah yang akan ditempuh dalam suatu audit. Program yang efektif dan ekonomis memfokuskan pada hal-hal penting yang memenuhi tujuan kunci operasi perusahaan bukan pada hal-hal yang menarik perhatian auditor. Program audit selalu berisi daftar dari prosedur audit. Biasanya juga menyatakan ukuran sample, pos khusus yang

dipilih, saat pelaksanaan dan biasanya ada satu program audit bagi setiap komponen audit. Dengan demikian akan ada program audit untuk piutang usaha, untuk penjualan, untuk kas, dan sebagainya. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melaksanakan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan paraf pelaksana prosedur audit tersebut, serta penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Program audit juga merupakan alat yang menghubungkan survey pendahuluan dengan pekerjaan lapangan. Dengan demikian program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Program audit dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit beserta komposisinya, jumlah asisten dan auditor junior yang akan ditugasi, taksiran jam yang akan dikonsumsi.

Program audit yang baik harus mencantumkan :

- a. Tujuan pemeriksaan
- b. Audit prosedur yang akan dijalankan (langkah-langkah)
- c. Kesimpulan pemeriksaan

2.3.1. Manfaat Program Audit

Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit.

Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi sesuai dengan keadaan. Dalam mengembangkan program audit, auditor harus diarahkan oleh hasil pertimbangan dan prosedur perencanaan auditnya.

Program audit yang disusun dengan baik bisa memberikan banyak manfaat antara lain :

1. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor maupun kepada staf auditor.
2. Menjadi dasar penugasan auditor.
3. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang dianggarkan.
4. Memungkinkan supervisor dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang dilaksanakan.
5. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit.
6. Memberi pedoman bagi auditor berikutnya jika melakukan pemeriksaan ditahun berikutnya.
7. Menjadi titik awal bagi supervisor dalam menilai dan mengevaluasi audit yang telah dilakukan.

Manfaat-manfaat potensial ini seharusnya menjadikan auditor layaknya 'budak' yang setia pada langkah-langkah audit tertentu, yaitu daftar pemeriksaan audit. Program audit tidak boleh menghambat inisiatif

dan kecakapan. Program tersebut hanya menjelaskan apa yang harus dicapai. Auditor harus selalu memperhatikan situasi, jika realitas berbeda dan diantisipasi, maka penyesuaian mungkin perlu dilakukan.

